

**DISPENSASI PERKAWINAN DITINJAU DARI ASPEK YURIDIS DAN
SOSIOLOGIS
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I Pada
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh :
Ambar Suci Wulandari
C100130014

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

**DISPENSASI PERKAWINAN DITINJAU DARI ASPEK YURIDIS DAN
SOSIOLOGIS (Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

AMBAR SUCI WULANDARI

C 100 130 014

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mutimatun Ni'amj', written over a vertical line.

Mutimatun Ni'amj, SH., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

**DISPENSASI PERKAWINAN DITINJAU DARI ASPEK YURIDIS DAN
SOSIOLOGIS (Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga)**




Oleh:

AMBAR SUCI WULANDARI

C 100 130 014

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017
dan dinyatakan telah memenuhi syarat.**

Dewan penguji:

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Mutimatun Ni'ami, SH., M.Hum
(Ketua Dewan Penguji) | (|  |) |
| 2. Prof. Dr. Harun
(Anggota I Dewan Penguji) | (|  |) |
| 3. WardahYuspin, SH., M.Kn., Ph.D
(Anggota II Dewan Penguji) | (|  |) |



Dekan


(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, SH.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 04 Agustus 2017

Penulis



AMBAR SUCI WULANDARI

C 100 130 014

**DISPENSASI PERKAWINAN DITINJAU DARI ASPEK YURIDIS DAN
SOSIOLOGIS
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga)**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Salatiga dalam memberikan dispensasi kawin; untuk mengetahui faktor penyebab sehingga banyak terjadi permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Salatiga; serta untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari adanya pemberian dispensasi kawin terhadap Pengadilan Agama Salatiga, pemohon dispensasi kawin dan pengaturan hukum Islam menurut ulama di masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan metode pendekatan normatif-empiris, serta dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim dalam mempertimbangkan penetapan dispensasi perkawinan melihat dari segi masalahnya serta dapat atau tidaknya permohonan dibuktikan dalam persidangan. Penyebab banyaknya pengajuan dispensasi di Pengadilan Agama Salatiga karena faktor kepentingan pemohon dan adanya desakan masyarakat, dimana hal ini dikarenakan calon pengantin wanita telah hamil terlebih dahulu. Dampak pemberian dispensasi ini yang dirasa pemohon tentu merupakan hal yang positif, pemberian dispensasi menurut salah satu ulama di salatiga apabila hakim telah mempertimbangkan alasan serta bukti selama persidangan bahwa calon pengantin laki-laki merupakan laki-laki yang menghamili calon pengantin wanita maka perkawinan dapat dilakukan.

Kata kunci : dampak, dispensasi perkawinan, faktor

Abstract

This study aims to analyze the judges' consideration of the Religious Court of Salatiga in providing marriage dispensation; To know the causal factor so that there are many application of dispensation of marriage in Religious Court of Salatiga; As well as to know and analyze the impact of the provision of marriage dispensation to the Religious Courts of Salatiga, the applicant for married dispensation and the regulation of Islamic law according to the clergy in the community. This research is descriptive and employs normative-empirical approach, and analyzed using qualitative analysis. The results of the research indicate that the judge in considering the establishment of marriage dispensation see in terms of masalahnya and whether or not the application is proven in the trial. The cause of the number of submissions dispensation in the Religious Court of Salatiga because of the interests of the applicant and the public pressure, which is because the bride has been pregnant first. The impact of this dispensation that the appellant deemed positive would be positive, the dispensation given according to one of the scholars in Salatiga if the judge had considered the reasons and evidence during the trial that the bridegroom was the man who impregnated the bride and groom then the marriage could be done.

Keywords: impact, marriage dispensation, factors

1. PENDAHULUAN

Dispensasi kawin adalah untuk perkawinan yang calon mempelai laki-laki ataupun perempuannya masih di bawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Batasan umur dalam melakukan perkawinan yang diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat pada pasal 7 ayat (1) yakni “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.” Kemudian dilanjut dengan pasal 7 ayat (2) yakni “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”

Dengan adanya batasan umur yang telah diatur dalam undang-undang tentu saja untuk membatasi terjadinya perkawinan dini, dimana kedua calon yang akan melakukan perkawinan masih di bawah umur yang telah ditentukan undang-undang. Tetapi apabila terjadi hal penyimpangan di dalam masyarakat maka pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan atau meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

. Pantauan dari kedua orang tua sangat dibutuhkan agar anak-anak tidak terjerumus pada pergaulan yang menyimpang atau pergaulan yang tidak baik. Lingkungan pun dapat mempengaruhi pertumbuhan pada anak, pertumbuhan yang dimaksud ialah cara anak-anak dalam bergaul di masyarakat. Dimana pada masa modern ini berbagai teknologi yang canggih telah beredar dimasyarakat luas dan telah digunakan oleh berbagai kalangan, dari yang tua hingga yang muda semua dapat menggunakan teknologi. Dengan adanya teknologi yang canggih pada saat ini tentunya memiliki dampak kepada pertumbuhan pada anak sebab semua hal-hal apapun yang belum saatnya anak-anak mengetahuinya dapat mereka melihat dan mencari sendiri secara langsung melalui teknologi.

Anak-anak yang terlalu banyak melihat hal-hal yang belum saatnya mereka ketahui yakni contohnya video porno, cara berpacaran seperti orang-orang

¹www.pa-tasikmalaya.go.id/sop-dispensasi-kawin diakses Sabtu 24 September 2016 pukul 17.00.

barat dan lain-lain maka itu akan mempengaruhi anak-anak untuk melakukan hal-hal seperti itu. Hal-hal seperti inilah yang nantinya akan menjerumuskan mereka kepada pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang terjadi dikalangan anak muda sekarang tentunya akan berdampak negatif. Dampak negatif yang terjadi salah satunya ialah pernikahan dini disebabkan hamil dari perzinahan.

Sesungguhnya Islam telah mengharamkan zina dan hal-hal yang membangkitkannya, seperti pergaulan yang diharamkan dan pertemuan tertutup (khalwat) yang berdampak negatif. Islam mengharamkan memasuki rumah orang lain kecuali setelah meminta izin. Islam juga menuntut suami-istri agar mengarjkan kepada anak-anak mereka, baik yang masih kecil maupun yang telah dewasa akan pentingnya meminta izin sebelum masuk ke kamar ayah ibu mereka, yaitu pada waktu-waktu tidur dan ketika melepas busana. Islam telah mewajibkan hijab (menutup aurat) atas wanita dan mengikatnya dengan berbagai etika, seperti tidak merendahkan ucapan kepada laki-laki dan lainnya.²

Untuk itu, ada banyak ayat al-Qur'an yang mendidik dan membimbing masyarakat muslim kepada nilai-nilai yang luhur, diantaranya adalah firman Allah swt:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ.

“Dan orang-orang yang memelihara kehormatannya.” (QS. Al-Mukminun [23] : 5).

Ayat itu memerintahkan agar memelihara furuj (kehormatan) dari kotoran syahwat yang tidak halal, menjaga hati dari berpikir hal-hal yang tidak halal, dan menjaga komunitas masyarakat dari mengikuti keinginan syahwat dan kesenangannya dengan tanpa batas. Juga menjaga masyarakat dari rusaknya kehidupan rumah tangga dan tidak teraturnya nasab, sebab rusaknya kehidupan rumah tangga dan tidak teraturnya nasab merupakan faktor kehancuran suatu masyarakat, yang akhirnya menyebarkan penyakit-penyakit sosial, mengacaukan dan meluluhlantakkan unsur-unsur masyarakat.³

²Yahya Abdurrahman Al-Khatib, 2003, *Hukum-Hukum Wanita Hamil (Ibadah, Perdata, Pidana)*, Jatim: Al-Izzah, hal. 81.

³*Ibid*, hal. 82.

Menurut data yang tercatat di Pengadilan Agama Salatiga, selama dalam kurun waktu setahun yakni pada tahun 2015, telah terjadi sebanyak 68 perkara dispensasi kawin dan pada tahun 2016 dari bulan januari hingga agustus telah terjadi sebanyak 36 perkara dispensasi kawin (data diperoleh penulis dari Pengadilan Agama Salatiga). Ini merupakan jumlah perkara yang terbilang banyak.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi ini tentang “Dispensasi Perkawinan Ditinjau dari Aspek Yuridis dan Sosiologis (Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga).

2. METODE

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan normatif-empiris yakni penulis tidak saja berusaha mempelajari pasal-pasal perundangan, pandangan pendapat para ahli dan menguraikan dalam skripsi atau karya penelitian ilmiahnya, tetapi juga menggunakan bahan-bahan yang sifatnya normatif itu dalam rangka mengolah dan menganalisis data-data dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan.⁴Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif.Cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisi kualitatif, yakni data-data yang ada disusun dalam kata-kata atau kalimat-kalimat.Metode ini bertujuan untuk memberi gambaran secara sistematis fakta dan karakteristik obyek dan subyek yang diteliti secara tepat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Salatiga dalam Memberikan Dispensasi Kawin

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Pengadilan Agama Kota Salatiga mengenai Dispensasi Perkawinan Ditinjau Dari Aspek Yuridis dan Sosiologis (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Salatiga), penulis dapat melakukan wawancara langsung dengan seorang hakim yang menangani kasus perkawinan di bawah umur yakni dengan bapak Drs. Muhdi Kholil SH., M.A., M.M selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Salatiga. Dalam wawancara tersebut penulis

⁴Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandar Lampung: Mandar Maju, hal. 63

memperoleh keterangan mengenai pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Salatiga dalam memberikan dispensasi perkawinan yaitu sebagai berikut:

Syarat utama dalam mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kota Salatiga tentu sama halnya dengan syarat-syarat umum dalam mengajukan permohonan dispensasi perkawinan yakni dengan melampirkan penolakan dari KUA yang ingin digunakan oleh kedua calon pengantin. KUA melakukan penolakan karena ada beberapa hal diantaranya salah satu atau kedua calon pengantin belum cukup umur dalam melakukan perkawinan yang telah diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk laki-laki berumur 19 tahun dan untuk wanita berumur 16 tahun.

Setelah adanya penolakan dari KUA barulah pemohon dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama dengan tahapan-tahapan yang telah diatur oleh Pengadilan Agama yakni yang pertama mengajukan permohonan dispensasi perkawinan kemudian menyelesaikan administrasi dan mengikuti setiap panggilan sidang yang akan ditentukan Pengadilan Agama. Untuk masalah waktu penyelesaiannya tergantung pada kasus yang terjadi, pemohonnya tertib datang atau tidak, pada saat pembuktian dapat terbukti atau tidak dan sebagainya. Sehingga tidak jalur khusus untuk permohonan dispensasi itu harus cepat dan didahulukan. Tetap harus mengikuti nomor perkara.

Pertimbangan hakim pada permohonan dispensasi kawin tentu ada yang ditolak dan ada yang diterima. Pertimbangan hakim yang menolak permohonan dispensasi kawin yakni tidak adanya alasan yang kuat dan tidak dapat dibuktikan secara hukum di dalam persidangan oleh para pemohon. Dan pertimbangan hakim yang menerima permohonan dispensasi kawin yakni para pemohon dapat membuktikan secara hukum di dalam persidangan dan disamping itu, hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin tentu akan mempertimbangkan dari segi masalahnya.

Hakim dalam melihat masalahnya dari beberapa aspek yakni aspek yuridis dan aspek sosiologis. Kalau dilihat dari unsur Kesehatan tentu saja melarang anak menikah di bawah umur, karena dari segi fisik anak di bawah umur belum diperbolehkan melahirkan dan dari segi psikis anak di bawah umur masih rentan akan depresi dalam menghadapi permasalahan rumah tangga dan juga

dilihat dari unsur Pendidikan tentu akan melarang anak-anak yang masih SMP atau bahkan yang masih SD untuk menikah, karena di dalam Pendidikan ada aturan yang mengatur tentang wajib sekolah hingga 9 tahun. Tetapi hakim tetap mempertimbangkan dari unsur Administrasi Kependudukan apabila wanita tersebut hamil terlebih dahulu, dimana anak-anak yang lahir tanpa wali bapaknya maka akan susah dalam mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara.

Hakim dalam mempertimbangkan setiap kasus harus melihat dari pembuktian yang diajukan oleh para pemohon. Walaupun para pemohon masih di bawah umur tetapi secara fisik dan psikis dapat dibuktikan bahwa para pemohon dapat melaksanakan perkawinan tentu saja hakim akan mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut. Contohnya para pemohon walaupun umurnya masih di bawah umur tetapi ia telah bekerja serta telah dapat menafkahi keluarganya dan ia bertanggungjawab maka tidak ada alasan untuk hakim untuk tidak mengabulkan permohonan dispensasi kawinnya.

Hakim dalam menerima permohonan dispensasi kawin tidak harus karena adanya kehamilan terlebih dahulu. Karena hakim melihat dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon. Apabila menurut hakim para calon pengantin ini belum siap secara fisik maupun psikis maka permohonan tersebut akan ditolak.

Hakim sebagai pelaksana kehakiman mempunyai kemerdekaan dan otoritas dalam menjalankan tugasnya, dalam menjalankan tugasnya hakim tidak dipengaruhi oleh suatu instansi manapun karena hakim hanya tunduk kepada hukum dan keadilan disamping itu juga, dalam membuat putusan hakim harus mempertimbangkan segala temuan yang temuan tersebut harus dipertimbangkan untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan untuk menentukan hukum. Tidak sedikit dari perkara yang diatur dalam undang-undang maka dari itu hakim harus berusaha menggali dan menemukan hukumnya dengan sebaik-baiknya dalam penemuan hukum yang belum diatur dalam undang-undang mula-mula, hakim berusaha menggali fakta-fakta tentang perkara yang akan diputuskan itu melalui alat bukti yang ada selanjutnya hakim menganalisisnya hasil dari analisis tersebut digunakan oleh hakim untuk menentukan hukumnya dan diterapkan dalam perkara yang bersangkutan. Dalam mengambil keputusan hakim harus mempertimbangkan antara undang-undang yang ada dengan fakta dalam

persidangan. Dalam perkara dispensasi nikah peraturan yang mengatur batasan usia seseorang yang dibolehkan melakukan pernikahan. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyebutkan bahwa bila seseorang (yang beragama Islam) belum mencapai usia minimum, dapat mengajukan dispensasi nikah kepada pengadilan agama. Aturan lain yang mengatur dispensasi nikah adalah pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, yang maksudnya sama dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun demikian aturan hukum tersebut tidak merinci alasannya.

Hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan pemberian dispensasi nikah terhadap pemohon mempunyai beberapa pertimbangan-pertimbangan yang mana pertimbangan hakim tersebut berdasarkan bukti- bukti dan saksi-saksi.⁵

3.2 Faktor Penyebab Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Salatiga

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Pengadilan Agama Kota Salatiga mengenai Dispensasi Perkawinan Ditinjau Dari Aspek Yuridis dan Sosiologis (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Salatiga), penulis dapat melakukan wawancara langsung dengan seorang hakim yang menangani kasus perkawinan di bawah umur yakni dengan bapak Drs. Muhdi Kholil SH., M.A., M.M selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Salatiga. Dalam wawancara tersebut penulis memperoleh keterangan mengenai faktor penyebab sehingga banyak terjadi permohonan kawin di Pengadilan Agama Salatiga yaitu sebagai berikut:

Kebanyakan calon isteri dalam keadaan hamil karena kedua belah pihak calon pengantin tersebut telah melakukan hal-hal yang selayaknya dilakukan oleh suami isteri yang sah. Mereka dalam melakukakan hal tersebut dipengaruhi oleh pergaulan bebas yang semakin meluas di jaman sekarang ini. Didukung pula oleh media internet yang dapat diakses dan dilihat oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun sehingga banyak kalangan muda yang terpengaruh dan tidak dapat memilih apakah kelak dampaknya akan baik ataupun buruk.

Adanya rasa kekhawatiran oleh pemohon apabila anak pemohon tidak segera dinikahkan maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti melanggar hukum agama dan hukum negara, sebab kedekatan yang terjalin pada

⁵ *Ibid*, hal 42-43

anak pemohon dan kekasihnya telah sangat erat dan tidak dapat dipisahkan serta sudah cukup lama dijalannya.

Adanya desakan dari masyarakat dan keluarga agar anak pemohon dan kekasihnya segera dinikahkan, karena masyarakat dan keluarga merasa tidak nyaman dengan kedekatan serta cara-cara pergaulan cinta yang dilakukan anak pemohon dan kekasihnya tersebut.⁶

Menurut data yang tercatat di Pengadilan Agama Salatiga, selama dalam kurun waktu setahun yakni pada tahun 2015, telah terjadi sebanyak 68 perkara dispensasi kawin dan pada tahun 2016 dari bulan januari hingga agustus telah terjadi sebanyak 36 perkara dispensasi kawin (data diperoleh penulis dari Pengadilan Agama Salatiga).

3.3 Hasil Wawancara dengan Narasumber dalam Salah Satu Perkara Perdata Islam Tentang Dispensasi Kawin Di Bawah Umur

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada kasus pemberian dispensasi kawin di bawah umur, penulis mendapati salah satu kasus yang diajukan oleh kedua orang tua dari calon pengantin laki-laki. Sebut saja calon pengantin laki-lakinya bernama AM dan calon pengantin wanitanya bernama EV. Dalam wawancara tersebut penulis memperoleh keterangan mengenai faktor penyebab sehingga pemohon mengajukan permohonan kawin di Pengadilan Agama Salatiga yaitu sebagai berikut:

Kedua orang tua calon pengantin laki-laki yang mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Salatiga karena calon pengantin laki-laki belum mencukupi umur yang telah diatur di dalam undang-undang yaitu 19 (sembilan belas) tahun, dimana ia baru berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat itu. Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dikarenakan anak pemohon dan kekasihnya telah melakukan hal-hal yang melewati batas pergaulan hingga sang kekasih mengandung 3 minggu.

Awalnya mereka telah mempersiapkan pernikahan untuk anak mereka tetapi pada saat mengurus surat-surat di KUA, disana mereka ditolak karena alasan calon pengantin laki-laki belum mencukupi umur yang telah diatur dalam

⁶ Muhdi Kholil, Hakim Pengadilan Agama Salatiga, *Wawancara Pribadi*, Salatiga 9 Februari 2017, pukul 14.00 WIB.

undang-undang. KUA pun menyarankan agar calon pengantin laki-laki umurnya dilebihkan saja dengan cara mengubah akta kelahiran dan memperbaiki kartu keluarga atau mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Salatiga agar calon pengantin laki-laki diperbolehkan menikahi calon pengantin wanitanya.

Akhirnya pemohon memilih mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Salatiga karena dirasa lebih aman dan hal tersebut pun diperbolehkan oleh undang-undang.

Pemohon ingin segera mendapatkan ijin sebelum kandungan calon pengantin wanita tersebut semakin membesar, karena takut akan membuat anak yang di dalam kandungan dilahirkan tanpa nama ayah kandungannya.

Pemohon pun takut akan menjadi buah bibir dan perlakuan yang tidak enak dari masyarakat karena tidak disegerakannya menikahkan anak pemohon dan kekasihnya tersebut.⁷

Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu Pemohon dalam perkara perdata Islam tentang dispensasi kawin di bawah umur mengenai faktor penyebab Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Salatiga maka menurut penulis faktor penyebab semakin banyaknya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Salatiga karena adanya rasa kekhawatiran oleh Pemohon. Rasa kekhawatiran yang dialami oleh Pemohon itu terjadi di luar pengaruh Pengadilan Agama Salatiga, bahkan pemohon mengetahui adanya dispensasi kawin pun dari KUA. Sebelumnya Pemohon pun tidak mengetahui adanya dispensasi kawin dan tidak mengerti maksud dari dispensasi kawin itu apa, tetapi Pemohon dijelaskan oleh pihak KUA tentang dispensasi kawin dan disuruh langsung datang ke Pengadilan Agama Salatiga.

3.4 Dampak dari Adanya Pemberian Dispensasi Kawin

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Pengadilan Agama Kota Salatiga mengenai Dispensasi Perkawinan Ditinjau Dari Aspek Yuridis dan Sosiologis (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Salatiga), penulis dapat melakukan wawancara langsung dengan seorang hakim yang menangani kasus perkawinan di bawah umur yakni dengan bapak Drs. Muhdi Kholil SH., M.A., M.M selaku

⁷EV, salah satu pemohon dalam pengajuan dispensasi kawin, *Wawancara Pribadi*, Salatiga 26 Februari 2017, pukul 11.00 WIB.

Wakil Ketua Pengadilan Agama Salatiga. Dalam wawancara tersebut penulis memperoleh keterangan mengenai dampak dari pemberian dispensasi kawin pada permohonan kawin di Pengadilan Agama Salatiga yaitu sebagai berikut:

Apabila permohonan dispensasinya diterima maka dampak yang dirasakan oleh Pemohon ialah terpecahkannya masalah yang terjadi pada Pemohon.

Jika di dalam permohonan tersebut calon pengantin wanita telah mengandung terlebih dahulu maka apabila permohonannya diterima, dampak yang dapat dirasakan ialah anak yang dikandung calon pengantin wanita tersebut akan mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara karena akta kelahirannya akan tercantum nama ayah kandung.

Dispensasi kawin yang meningkat setiap tahunnya di Pengadilan Agama Salatiga bukan merupakan dampak dari dikabulkannya permohonan dispensasi kawin pada perkara-perkara sebelumnya, karena hal tersebut tidak ada kaitannya. Masyarakat pun pada awalnya tidak mengetahui adanya dispensasi kawin di bawah umur, mereka kebanyakan mengetahui hal tersebut dari pihak luar Pengadilan Agama Salatiga.⁸

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada kasus pemberian dispensasi kawin di bawah umur, penulis mendapati salah satu kasus yang diajukan oleh kedua orang tua dari calon pengantin laki-laki. Sebut saja calon pengantin laki-lakinya bernama AM dan calon pengantin wanitanya bernama EV. Dalam wawancara tersebut penulis memperoleh keterangan mengenai dampak dari adanya pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Salatiga yaitu sebagai berikut:

Pemohon menjadi tidak khawatir lagi setelah diberikannya ijin menikah melalui penetapan dispensasi kawin di bawah umur yang ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Salatiga.

Pemohon menjadi tidak merasa dikucilkan di masyarakat setelah diberikannya ijin menikah melalui penetapan dispensasi kawin di bawah umur yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Salatiga.

⁸Muhdi Kholil, Hakim Pengadilan Agama Salatiga, *Wawancara Pribadi*, Salatiga 9 Februari 2017, pukul 14.00 WIB.

Pemohon merasa masalah yang ada didalam keluarganya telah selesai setelah ditetapkannya penetapan dari Pengadilan Agama Salatiga dan sekarang pemohon hanya perlu membimbing dan membina anak pemohon dalam berumah tangga.⁹

Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu Pemohon tersebut, maka menurut penulis pemberian dispensasi tersebut telah memberikan dampak yang baik kepada Pemohon terutama bagi anak Pemohon, kekasihnya dan juga pada anak yang dikandung.

Pemohon sudah tidak perlu khawatir lagi tentang keluarganya dihadapan masyarakat. Setelah diberikannya dispensasi kawin maka tugas Pemohon adalah terus membimbing anak Pemohon dalam berumah tangga.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian secara Yuridis dan Sosiologis mengenai perkara dispensasi kawin di bawah umur dengan cara mengambil dan menganalisis Penetapan di Pengadilan Agama Salatiga serta melakukan beberapa kali wawancara yaitu salah satu Hakim Pengadilan Agama Salatiga, salah satu Pemohon yang mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Salatiga dan salah satu Ustadz selaku Ulama di dalam masyarakat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

4.1.1 Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Salatiga dalam memberikan dispensasi kawin

Secara Yuridis, hakim dalam menetapkan penetapannya dalam No. Penetapan : 0049/Pdt.P/2016/PA.SAL telah sesuai dengan undang-undang dan hakim telah melakukan tugasnya dengan baik yaitu dengan tidak hanya terpacu oleh undang-undang saja tetapi hakim telah mempertimbangkan hingga dampak yang terjadi ke depan apabila tidak diterimanya dispensasi kawin ini.

Hasil wawancara penulis terhadap salah satu hakim di Pengadilan Agama Salatiga, hakim dalam mempertimbangkan penetapan melihat dari

⁹EV, salah satu pemohon dalam pengajuan dispensasi, Wawancara Pribadi, Salatiga 26 Februari 2017, pukul 11.00 WIB.

segi masalahnya. Hakim dapat menolak permohonan dispensasi kawin apabila tidak adanya alasan yang kuat dan tidak dapat dibuktikan di dalam persidangan. Wanita yang sedang hamil karena melakukan perzinaan bukan menjadi alasan hakim dalam menerima permohonan dispensasi kawin, sebab yang menjadi pertimbangan hakim ialah masalahnya.

Mengenai pendapat bahwa wanita hamil tidak diperbolehkan menikah, menurut hakim itu merupakan doktrin sehingga menurut hakim doktrin tersebut boleh digunakan dan boleh tidak digunakan. Tergantung pada keyakinan para hakim tersebut, tetapi hakim dalam mempertimbangkan mengenai dispensasi kawin tentu tidak boleh hanya terpaku pada undang-undang ataupun doktrin saja. Hakim harus memikirkan dampak yang terjadi ke depan apabila permohonan dispensasi kawin ini diterima atau ditolak.

4.1.2 Faktor Penyebab Sehingga Banyak Terjadi Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Salatiga

Penyebab banyak pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Salatiga bukan karena faktor dari dalam Pengadilan Agama Salatiga, seperti yang disangkakan oleh penulis dimana faktor penyebab banyak pengajuan permohonan dispensasi kawin disebabkan akibat mudahnya dalam meminta ijin dispensasi kawin di Pengadilan Agama Salatiga.

Penyebab sehingga banyak terjadi permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Salatiga dikarenakan faktor dari kepentingan Pemohon tersebut dan adanya desakan dari masyarakat. Pemohon merasa khawatir akan menjadi buah bibir di masyarakat dan akan dikucilkan karena tidak segera menikahkan anak dan kekasihnya akibat pergaulan bebas yang membuat masyarakat tidak nyaman akan hal tersebut. Pemohon juga merasa khawatir akan nasib ke depan untuk anak yang dikandung apabila tidak mendapatkan nama atas ayah kandungnya. Adanya desakan dari masyarakat muncul karena masyarakat merasa tidak nyaman dengan kedekatan serta cara-cara pergaulan cinta yang dilakukan anak Pemohon dan kekasihnya tersebut.

4.1.3 Dampak Dari Adanya Pemberian Dispensasi Kawin

Dampak yang dirasa oleh Pemohon merupakan hal yang positif karena kekhawatiran seperti dikucilkan oleh masyarakat telah tidak dirasakan lagi dan permasalahan di dalam keluarga Pemohon telah dapat teratasi.

Menurut Ustadz Drs. H. Nasyafi Nawawi, M.Ag, seorang wanita yang hamil karena perzinahan hanya boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Sedangkan apa yang terjadi pada pemberian dispensasi kawin tentu saja calon pengantin laki-laki merupakan laki-laki yang menghamili calon pengantin wanita tersebut, karena hakim pasti telah mempertimbangkan alasan serta bukti-bukti yang telah dibuktikan selama persidangan.

4.2 Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka selanjutnya penulis ingin memberikan beberapa saran-saran yang berhubungan dengan pemberian dispensasi di Pengadilan Agama Salatiga, yaitu antara lain sebagai berikut:

- 4.2.1** Bagi Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin dimana kepentingannya mendesak sebaik ada jalur khusus agar tidak terlalu lama dalam mendapatkan proses dipersidangan, sehingga Pemohon yang mempunyai kepentingan mendesak agar dapat menyelesaikan masalahnya lebih cepat. Tetapi hakim dalam memutuskannya pun harus cermat, lebih bijaksana dan tidak hanya karena adanya hal-hal yang mendesak sehingga hakim tidak teliti dalam memberikan penetapan.
- 4.2.2** Hakim tidak harus menerima setiap permohonan dispensasi yang dikarenakan calon pengantin wanita telah hamil. Apabila memang menurut keyakinan hakim hal tersebut tidak dapat dibuktikan dan tidak memiliki alasan yang kuat maka hakim harus tegas dalam menolak permohonan dispensasi tersebut. Penolakan yang dilakukan hakim sebaiknya ditambahkan dengan nasihat-nasihat agar Pemohon tetap merasa tenang dan dapat menerima penetapan hakim tersebut.
- 4.2.3** Hakim harus tetap berpegangan pada hukum yang berlaku yang telah ditetapkan dan aturan Undang-undang serta didukung oleh keyakinan hakim

sendiri karena setiap penetapan yang ditetapkan oleh hakim merupakan tanggung jawab hakim terhadap Allah SWT., bangsa dan negara, hukum, serta masyarakat.

PERSANTUNAN

Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan karya ilmiah ini saya persembahkan kepada *pertama*, orang tua tercinta yang telah memberikan kasih sayang serta doanya, sehingga saya bisa menyelesaikan karya ilmiah ini, *kedua*, dekan yang telah memberikan arahan dalam pembuatan karya ilmiah ini, *ketiga*, pembimbing saya yang telah memberikan arahan dan masukan dalam pembuatan karya ilmiah ini, *keempat*, dosen-dosen fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selama ini sudah mendidik serta memberikan ilmu selama di perkuliahan, *kelima*, sahabat-sahabatku tercinta yang selalu memberikan dukungannya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman Al-Khatib, Yahya, 2003, Hukum-Hukum Wanita Hamil, Jatim: Al-Izzah.

Ahyani Sri, Februari 2016, PERTIMBANGAN PENGADILAN AGAMA ATAS DISPENSASI PERNIKAHAN USIA DINI AKIBAT KEHAMILAN DI LUAR NIKAH, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 34, No. 1.

Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers.

Imron Ali, November 2013, "Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan Di Bawah Umur", Al-Tahrir, Vol. 13, No. 2.

Kompilasi Hukum Islam.

Mardani, 2011, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern, Yogyakarta: GRAHA ILMU.

Maylissabet, 2015, Praktek Dispensasi Nikah Karena Hamil Di Pengadilan Agama Se-D.I.Yogyakarta, Tesis.

Nayan Mir, 2015; 1(5), “Child marriage in India: Social maladies and government’s initiatives”, International Journal of Applied Research.

Shodikin Akhmad, Januari-Juni 2015, “PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN”, Mahkamah Vol. 9 No. 1.

Suratman dan H. Philips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.